PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **BANK INDONESIA (BI)**

UNIT KERJA : **KPW PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI DARMADI SUDIBYO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **256977**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 9.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Bangunan Seluas 7 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 3.288 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 145.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/51 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.575.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.525.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
8. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 531.500.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**65.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**4.661.339.200**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**500.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**475.000.000**
	Sub Total	**Rp.**	**15.542.839.200**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**15.542.839.200**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.